

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di kawasan agroekosistem dataran tinggi Bromo. Dataran tinggi Bromo berada dalam empat pemerintahan kabupaten, meliputi: kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang. Pelaksanaan penelitian di tiga desa yang berada di kawasan dataran tinggi Bromo, gambar peta pada lampiran 2. Ketiga desa tersebut adalah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, dan Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

#### 1. Desa Ngadas

Desa Ngadas merupakan desa yang termasuk dalam Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang. Desa Ngadas terbagi dalam 2 dusun, yaitu dusun Ngadas dan dusun Jarak Ijo. Letak desa ini dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Desa Mororejo, Kecamatan Tosari,
- Batas Selatan : Desa Ranupane, Kecamatan Senduro,
- Sebelah Barat : Desa Gubug klakah Kecamatan Poncokusumo
- Sebelah Timur : Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.



Gambar 2. Peta Kecamatan Poncokusumo  
Sumber: Kantor Desa Ngadas, 2015

Jumlah penduduk per bulan Januari 2015 tercatat 1.879 jiwa dengan luas wilayah desa Ngadas 395 ha terbagi menjadi :

Tabel 7. Luas Wilayah Desa Ngadas

No.	Fungsi Lahan	Luas Lahan (Ha)	%
1.	Lahan pertanian	381	96,46
2.	Lahan permukiman	14	3,54
<b>Jumlah</b>		<b>395</b>	<b>100</b>

Sumber: Data sekunder kantor desa Ngadas, 2015

Berdasarkan data pada tabel 7 diketahui bahwa 96,46% luasan area di desa Ngadas merupakan lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan warga, selain bidang pertanian sebagian kecil penduduk Desa Ngadas mendapat penghasilan sampingan dari berternak dan sektor pariwisata. Kegiatan berternak warga tergolong dalam skala kecil, meliputi ternak ayam, babi, sapi, dan kuda, sedangkan dari sektor pariwisata sebagian kecil warga sebagai makelar fasilitas wisata, penyewa rumah penginapaan atau *Home stay* , penyewa kuda, jasa ojek motor dan sewa kendaraan mobil Jip.

## 2. Desa Ngadisari

Lokasi penelitian kedua di Desa Ngadisari kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo. Desa Ngadisari terbagi dalam 3 Dusun, yaitu Dusun Wanasari, Ngadisari, dan Cemoro Lawang. Secara geografi Desa Ngadisari dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Desa Sapih,
- Sebelah Selatan : Desa Ngadas,
- Sebelah Barat : Desa Wonokitri,
- Sebelah Timur : Desa Wonoto.



Gambar 3. Peta Desa Ngadisari

Sumber: Kantor Desa Ngadisari, 2015

Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 1561 jiwa, dengan luas wilayah desa Ngadisari 775,3 ha terbagi menjadi :

Tabel 8. Luas Wilayah Desa Ngadisari

No.	Fungsi Lahan	Luas Lahan (Ha)	%
1.	Ladang/ Tegalan (Lahan Pertanian)	456	58,82
2.	Pemukiman	43,263	5,57
3.	Hutan masyarakat	130	16,77
4.	Hutan lindung	146	18,83
5.	Lain- lain	0,037	0,0047
<b>Jumlah</b>		<b>775,3</b>	<b>100</b>

Sumber: Data sekunder kantor desa Ngadisari, 2015

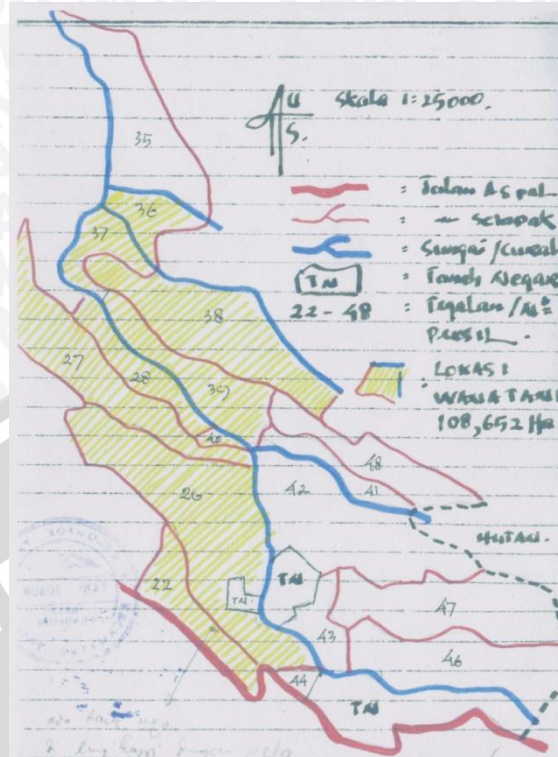
Berdasarkan data pada tabel 8 diketahui bahwa 58,82% luasan area di desa Ngadisari merupakan lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduk desa Ngadisari mengandalkan sektor pertanian. Disamping itu rata-rata penduduk memiliki ternak sapi dan kuda. Sektor pariwisata merupakan sektor terbesar kedua setelah pertanian yang menjadi sumber penghasilan bagi warga Desa Ngadisari hal ini ditandai luas lahan pemukiman 43,263 ha sebagai besar digunakan sebagai pemukiman pribadi dan *home stay*.

Umumnya penduduk desa Ngadisari adalah petani, 90% merupakan petani mandiri yang mampu mengelola lahannya dengan modal sendiri, sisanya merupakan petani kecil yang berkerjasama dengan petani sukses dalam pembiayaan kegiatan bertani. Selain di bidang usahatani, masyarakat Ngadisari memiliki sumber penghasilan lain, yaitu penyewaan kuda bagi wisatawan. Sumber penghasilan lain berupa penyewaan kuda ini terdapat kerjasama antar pemilik modal kuda dan perawat kuda, sehingga terdapat pola kerjasama di luar usahatani. Perawatan ternak kuda ini sudah menjadi alternatif usaha, tanpa meninggalkan kegiatan bertani.

### 3. Desa Wonokitri

Desa Wonokitri merupakan desa yang masuk dalam Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Desa Wonokitri terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun Wonokitri dan Sanggar. Luas wilayah desa Wonokitri seluas 1.120,98 Ha. Batas wilayah desa sebagai berikut

- Sebelah Utara : Desa Sedaeng,
- Sebelah Selatan : Desa Podokoyo,
- Sebelah Timur : Desa Keduwung,
- Sebelah Barat : Desa Tosari.



Gambar 4. Peta Desa Wonokitri

Sumber: Kantor Desa Wonokitri, 2015

Jumlah penduduk desa Wonokitri per Januari 2015 sebesar 2.959 Jiwa. Sebanyak 90% penduduk Desa Wonokitri berkerja sebagai petani, 5 % sebagai buruh tani dan sisanya 5 % sebagai pedagang. Mayoritas penduduk Wonokitri berkerja di bidang pertanian, meskipun disamping pertanian terjadi peningkatan ekonomi dari bidang wisata. Kegiatan bertani tetap menjadi pekerjaan utama warga desa Wonokitri, hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap pesan leluhur dan nenek moyang mereka untuk tetap melaksanakan kegiatan bertani sebagai penunjang kelangsungan hidup mereka.

## 5.2 Identifikasi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, seluruh responden merupakan petani yang pernah menjalani kerjasama kemitraan usahatani. Pelaksanaan kerjasama kemitraan usahatani ini terjalin antar petani dalam masing-masing wilayah desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi sesama petani dalam desa tersebut. Lokasi petani yang menjadi sampel tersebar di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Desa Ngadisari Kecamatan

Sukapura Kabupaten Probolinggo, dan Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Bromo. Pada penelitian ini karakteristik responden yaitu meliputi usia petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama pengalaman mengikuti kerjasama mitra usahatani, dan peran petani dalam kerjasama kemitraan usahatani.

### 5. 2. 1 Usia Petani Responden

Usia petani merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dan kemampuan petani dalam menentukan keputusan melaksanakan kerjasama mitra usahatani atau non mitra. Tingkat usia petani yang muda lebih cenderung bisa menerima atau progresif dalam proses transfer inovasi atau teknologi baru, sehingga mempercepat proses alih teknologi. Karakter usia petani Kawasan Dataran Tinggi Bromo dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Karakteristik Petani Responden Berdasarkan Usia

Umur Tahun	Desa Ngadas		Desa Ngadisari		Desa Wonokitri		Seluruh desa	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
25<	0	0	0	0	1	6,67	1	2,22
25- 34	5	33,33	2	13,33	6	40	13	28,89
35- 44	5	33,33	6	40	3	20	14	31,11
45- 54	3	20	1	6,67	3	20	7	15,56
55- 64	2	13,33	6	40	2	13,33	10	22,22
Jumlah	15	100	15	100	15	100	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa usia responden yang memiliki pengalaman melaksanakan kerjasama mitra di Kawasan Dataran Tinggi Bromo jumlah responden terbanyak pada tingkat usia 35 – 44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang pernah mengikuti kerjasama kemitraan memiliki rata-rata umur produktif. Data usia petani di desa Ngadas paling banyak terdapat pada tingkat usia 25 – 44 tahun, hal ini disebabkan oleh petani tingkat tersebut secara turun – temurun mengikuti orang tuanya, dengan melanjutkan kerjasama mitra usahatani dengan pihak pemilik modal yang sama, atau merupakan pemilik usahatani sukses diusia muda dan berkerjasama mitra sebagai petani pemberi modal.

Petani di desa Ngadisari yang pernah melaksanakan kerjasama mitra paling banyak pada tingkat usia 55 - 64 tahun, hal ini disebabkan oleh kondisi jumlah responden yang sedang melaksanakan kerjasama mitra yang ditemui sangat terbatas, sehingga diperoleh responden pada tingkat usia 55 – 64 sebatas pernah mengikuti kerjasama kemitraan, yang sudah tidak mengikuti kerjasama kemitraan di masa sekarang. Pada tingkat usia responden di desa Wonokitri diperoleh data tertinggi pada tingkat usia 25 – 34 tahun, hal ini disebabkan oleh kegiatan kerjasama kemitraan antar petani Desa Wonokitri umumnya masih banyak ditemukan, sehingga tidak ada kendala memperoleh responden yang sedang menjalankan kerjasama mitra maupun yang pernah melaksanakan kerjasama mitra antar petani pada usia muda tersebut.

### 5. 2. 2 Tingkat Pendidikan Petani Responden

Karakteristik petani menurut tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang atau petani yang pernah melaksanakan kerjasama mitra untuk menyerap pengetahuan baru yang bermanfaat dalam kegiatan usahatani. Tingkat pendidikan mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang dalam menerima dan menyerap inovasi maupun informasi yang datang untuk diterimanya. Identifikasi tingkat pendidikan dalam penelitian ini meliputi jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan Sarjana. Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan di Kawasan Dataran Tinggi Bromo.

Tabel 10. Karakteristik Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Desa Ngadas		Desa Ngadisari		Desa Wonokitri		Seluruh Desa	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
SD	8	53,33	9	60	12	80	29	64,44
SMP	4	26,67	3	20	2	13,33	9	20
SMA	2	13,33	2	13,33	1	6,67	5	11,11
PT	1	6,67	1	6,67	0	0	2	4,44
Jumlah	15	100	15	100	15	100	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di Kawasan Dataran Tinggi Bromo sebanyak 29 orang dengan nilai

64,44% merupakan lulusan tingkat SD. Pada data dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden di Kawasan Dataran Tinggi Bromo yang pernah melaksanakan kerjasama kemitraan antar petani tergolong rendah dengan tingkat pendidikan paling dominan pada tingkat SD. Rata-rata petani responden pada tingkat pendidikan SD sebagian besar sebagai pihak penerima modal, sisanya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagai pihak pemberi modal. Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak dibatasi pendidikan dalam menentukan ikutserta melaksanakan kerjasama mitra. Sebagai pihak pemberi modal melihat calon mitra mengutamakan berdasarkan kemauan, pengalaman usahatani dan karakter sifat petani penerima modal.

### 5. 2. 3 Jumlah Anggota Keluarga Petani Responden

Jumlah anggota keluarga menunjukkan berapa jumlah keluarga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota yang ikut dan hidup bersama-sama dalam satu keluarga yang ada dalam satu rumah yang meliputi suami, istri, anak, orang tua maupun keluarga lain yang ada dalam satu rumah dengan petani responden. Tabel 11 berikut merupakan karakteristik petani responden berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan petani responden.

Tabel 11. Karakteristik Petani Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan (Orang)	Desa Ngadas		Desa Ngadisari		Desa Wonokitri		Seluruh Desa	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
2	1	6,67	1	6,67	0	0	2	4,44
3	5	33,33	6	40	3	20	14	31,11
4	5	33,33	4	26,67	5	33,33	14	31,11
≥5	4	26,67	4	26,67	7	46,67	15	33,33
Jumlah	15	100	15	100	15	100	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan data Tabel 11 di atas, dapat dilihat bahwa tanggungan keluarga petani responden rata-rata terdiri dari 3 - ≥ 5 orang. Jumlah petani responden di Kawasan Dataran Tinggi Bromo yang memiliki tanggungan keluarga 3 - ≥ 5 orang sebanyak 43 responden. Semakin banyak jumlah

tanggung keluarga yang dimiliki petani responden, maka semakin besar tanggung jawab petani responden untuk berusaha dalam kegiatan usahatani. Sehingga bagi petani pemberi modal dapat memperoleh penghasilan selain dari usahatani mandiri, yaitu penghasilan tambahan dari kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan. Penanaman modal ini dalam bentuk kerjasama kemitraan yang sedang berjalan antar petani tersebut. Pelaksanaan kerjasama mitra usahatani ini bagi petani penerima modal dapat memberikan motivasi untuk mencapai hasil usahatani yang baik. Selain itu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bagi petani penerima modal atas kepercayaan yang diberikan petani pemberi modal, supaya tidak merugikan bagi kedua pihak.

#### 5. 2. 4 Lama Pengalaman Kemitraan Petani Responden

Lama pengalaman petani responden yang pernah melaksanakan kemitraan usahatani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada kemampuan manajemen dan memprediksi petani dalam menentukan kebijakan yang diambil selama melaksanakan kerjasama mitra usahatani. Lama pengalaman berkerjasama petani pada umumnya menunjukkan pengetahuan dan pertukaran informasi yang lebih banyak dibandingkan petani yang belum pernah melaksanakan kerjasama dibidang pertanian. hal tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk mengikuti kerjasama mitra usahatani. Tabel 12. adalah Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerjasama Mitra Usahatani.

Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Kerjasama Mitra Usahatani

Lama Kerjasama Mitra (Tahun)	Desa Ngadas		Desa Ngadisari		Desa Wonokitri		Seluruh Desa	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
0 – 5	3	20	2	13,33	8	53,33	13	28,89
6 – 15	3	20	4	26,67	1	6,67	8	17,78
16 - 25	1	6,67	1	6,67	1	6,67	3	6,67
26 - 35	8	53,33	8	53,33	5	33,33	21	46,67
Jumlah	15	100	15	100	15	100	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 12 menyajikan informasi lama tahun pengalaman kerjasama yang dimiliki Responden 46,67% pada kisaran 26 – 35 tahun. Lama pengalaman



periode kerjasama mitra yang dimiliki responden menentukan keputusan untuk melanjutkan kerjasama mitra dengan antar petani. Umumnya kegiatan kerjasama mitra terjalin antar petani yang tinggal dalam satu kawasan desa saja. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan dan tradisi adat untuk mensejahterakan sesama saudara dalam kawasan masing- masing desa tersebut.

Responden pada lokasi penelitian ini dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu petani pemilik modal dan petani pemilik tenaga. Berikut tabel responden berdasarkan kategori kepemilikan:

Tabel 13. Karakteristik Petani Responden Berdasarkan Kategori Kepemilikan Modal

Kategori	Desa Ngadas		Desa Ngadisari		Desa Wonokitri		Seluruh Desa	
	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
Pemilik Modal (Saprodi)	8	53,33	4	26,67	10	66,67	22	48,89
Pemilik Tenaga	7	46,67	11	73,33	5	33,33	23	51,11
Jumlah	15	100	15	100	15	100	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 13 diatas merupakan kategori responden berdasarkan kepemilikan modal responden pada pengalaman kerjasama mitra usahatani. Jumlah responden yang dimiliki dalam penelitian ini menunjukkan proporsi yang mendekati seimbang antara kategori pemilik modal saprodi dan pemilik tenaga. Hal ini sebagai pertimbangan keakuratan pendapat responden terkait penilaian indikator kelayakan teknis dan moral yang diajukan oleh peneliti. Profil responden selengkapnya pada lampiran 3.

### 5.3 Pola Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan, dengan berbagai macam bentuk kerjasama bertujuan untuk memperkuat masing- masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian di kawasan dataran tinggi Bromo diperoleh berbagai macam pola baik dibidang pertanian dan peternakan. Secara garis besar terdapat 2 macam pola kerjasama mitra dibidang pertanian yang tidak dibatasi oleh jenis komoditasnya, sedangkan pola kerjasama

pada bidang peternakan terdapat 3 macam pola yang bergantung pada jenis ternak yang dikelola.

Keberadaan pola kemitraan yang berlangsung di desa kawasan dataran tinggi Bromo dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hukum adat istiadat, budaya dan agama menjadi salah satu pendukung setiap kebijakan yang berlaku di desa kawasan ini. Pengetahuan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan antar petani berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan warga ketika mengalami kekurangan modal dalam berusahatani. Kerjasama berlangsung ketika salah satu pihak mengalami kekurangan modal, kemudian menawarkan kepada petani yang dianggap petani sukses untuk menyediakan sebagian atau seluruh kebutuhan modalnya.

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut dalam menentukan hak, kewajiban dan imbangnya pembagian hasil yang akan dibagi. Batasan waktu kerjasama bagi hasil yang terjalin antar petani tidak ada ketetapan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa batas berakhirnya kerjasama mengikuti selesai satu kali musim panen tanaman yang diusahakan. Pelaksanaan kerjasama antar petani dapat berlanjut pada musim berikutnya sesuai kesepakatan apabila masih diperlukan. Perjanjian ini cukup dilakukan secara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga dengan mudah saling memahami isi dari kesepakatan dan berdasarkan rasa saling percaya, sehingga tidak ada kesepakatan secara tertulis dalam memulai kerjasama bagi hasil.

### **5.3.1 Kemitraan Sistem Kerjasama Bagi Hasil dibidang Pertanian**

Bentuk kerjasama dibidang pertanian berdasarkan hasil penelitian di kawasan dataran tinggi Bromo terdapat dua pola kerjasama usahatani. Pola kerjasama bagi hasil “Maro” dan “Mertelon” merupakan pola kerjasama yang umum dilaksanakan oleh petani di kawasan dataran tinggi Bromo. Hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama pola “Maro” dan “Mertelon” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Hak dan kewajiban kerjasama dibidang pertanian

Jenis Kemitraan	Hak dan Kewajiban			
	Petani Penerima Modal		Petani Pemilik Modal/ Investor	
	Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Maro	Memperoleh biaya input dari petani pemilik modal (investor) berupa bibit, dan obat atau sesuai kesepakatan	Membayar pajak lahan	Bebas biaya membayar pajak	Menyediakan input berupa bibit dan obat atau sesuai kesepakatan.
	Memperoleh hasil panen sebesar 50% dari komoditas yang dibudidayakan	Menyediakan lahan, pupuk dan tenaga kerja atau sesuai kesepakatan	Tersedia lahan, pupuk, dan tenaga atau sesuai kesepakatan	Memberikan hasil panen sebesar 50% dalam bentuk uang atau sesuai kesepakatan kepada petani mitra
		Memberikan hasil panen sebesar 50% dalam bentuk uang atau sesuai kesepakatan kepada pemilik modal	Memperoleh hasil panen sebesar 50% dari hasil panen kerjasama dengan petani mitra	Menanggung setengah biaya kerugian pada saat gagal panen
		Mengelola dan merawat mulai dari masa tanam sampai masa panen	Mengontrol, mengawasi dalam pengolahan lahan dan perawatan komoditas yang	
		Tidak memindah tangankan pengelolaan lahan kepada orang lain	Diusahakan	
	Menanggung setengah biaya kerugian pada saat gagal panen			
Mertelu	Mendapatkan biaya input berupa lahan, bibit, pupuk, dan obat	Membayar pajak lahan	Tersedia lahan dan tenaga kerja	Menyediakan input berupa bibit, obat, dan pupuk
	Memperoleh 1/3 dari hasil	Menyediakan lahan dan tenaga	Memperoleh 2/3 dari hasil	Ikut menanggung biaya kerugian

Tabel 14. (Lanjutan)

Jenis Kemitraan	Hak dan Kewajiban			
	Petani Penerima Modal		Petani Pemilik Modal/ Investor	
	Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
	Panen	Kerja	Panen	pada saat gagal panen sesuai kesepakatan
Mertelu		Mengolah lahan pertanian serta merawatnya	Mengontrol, mengawasi dalam pengolahan lahan dan Perawatan	
		Memberikan hasil panen kepada investor dengan pembagian 2/3 dari hasil panen		
		Tidak memindah tangankan pengelolaan lahan kepada orang lain		
		Menanggung biaya kerugian pada saat gagal panen		

a. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama “Maro”

Kerjasama bagi hasil “Maro” pada umumnya dilaksanakan antara petani masyarakat dalam satu lingkungan desa. Kerjasama ini berlangsung dengan pembagian modal untuk mengelola komoditas dengan perbandingan 1 : 1 atau sesuai kesepakatan, pada umumnya pembagian modal perbandingan antara bibit bersama obat- obatan dengan pupuk bersama tenaga. Ketersediaan lahan sebagai tempat kerjasama kemitraan usahatani antar petani ini dipenuhi oleh salah satu pihak pelaksana kerjasama yang memiliki lahan kosong yang belum diusahakan. Sehingga tidak ada aturan yang mengikat dalam penyediaan lahan, kecuali apabila lahan usahatani merupakan lahan sewa, maka biaya sewa ditanggung oleh petani sebagai pemilik tenaga kerja. Pola pengadaan modal ini umum dilaksanakan di desa kawasan dataran tinggi Bromo, ada sebagian yang menyesuaikan dengan kesepakatan masing- masing pelaku kerjasama. Pembagian hasil panen pada pola kerjasama “Maro” ini berlaku pembagian dengan proporsi 1:1 setelah penjualan komoditas yang ditanam berupa uang.

Pola kerjasama “Maro” di Desa Ngadas dan Ngadisari secara umum dilaksanakan pada kegiatan tanam komoditas kentang, karena komoditas kentang merupakan komoditas dengan nilai jual tinggi, jika dibandingkan dengan komoditas kubis dan bawang prei. Selain itu biaya yang dikeluarkan selama proses budidaya kentang membutuhkan modal yang lebih tinggi dibandingkan 2 komoditas lainnya, sehingga petani seringkali mengalami kendala pengadaan modal untuk menanam komoditas kentang. Usahatani pada komoditas kubis dan bawang prei jarang menjadi komoditas dalam pelaksanaan kerjasama “Maro” ini, hal ini dipengaruhi oleh biaya pembelian bibit dan biaya perawatan tergolong murah, untuk usahatani komoditas kubis dan bawang prei petani mampu memenuhi kebutuhan modal sendiri.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada petani pelaksana kerjasama maro dan mertelon sebagai petani pemilik modal terkait dengan perbandingan biaya budidaya komoditas kentang, kubis dan bawang prei. Wawancara dilakukan kepada ketua kelompok tani desa Ngadisari Bapak Sutiksan (42) sebagai petani pemilik modal, mengenai perbandingan biaya satu musim tanam kentang, kubis dan bawang prei sebagai berikut:

*“Biaya usahatani kentang itu lebih banyak dibandingkan dengan kubis dan bawang prei, kira- kira kebutuhan total biaya untuk satu hektar tanaman kentang mulai dari pupuk kandang, pupuk kimia, dan obat- obatan bisa habis sembilan sampai sepuluh juta, kalau bibit kan punya sendiri, yang masih sisa panen yang kecil dijadikan bibit. tapi sebanding dengan yang dihasilkan, kalau hasil panennya lumayan ya bisa dapat empat puluh sampai lima puluh juta. Kalau menanam kubis dan bawang prei rata- rata petani pakai modal sendiri, biaya bibitnya murah, perawatannya gampang, tidak perlu banyak pupuk dan obat- obatan, katakanlah menanam kubis atau bawang prei satu hektar, biaya untuk beli bibit, pupuk, obat- obatan habis satu setengah sampai dua juta, hasilnya kalau panen dapat lima sampai enam juta saja, ya mending ditanami sendiri, jadi jarang orang “Maro” atau “Mertelonkan” kubis dan bawang prei.”*

Dari pernyataan petani responden yang memiliki pengalaman kerjasama “Maro” dan “Mertelon” di atas menunjukkan bahwa umumnya pelaksanaan kerjasama maro pada komoditas kentang, karena dibutuhkan biaya perawatan tinggi, sedangkan pada komoditas kubis dan bawang prei umumnya diusahakan sendiri, karena tidak membutuhkan biaya tinggi dan biasanya lahan yang diusahakan tanaman prei  $\leq 0,25$  ha.

Pelaksana “Maro”	Profil
	<p>Nama: Sutiksan          Usia : 36 th          Pendidikan terakhir : SMA          Jabatan : Ketua Kelompok Tani          Investor/ Petani Pemilik Modal          Sebagai penyedia biaya bibit kentang dan obat- obatan.          Kerjasama dengan Ibu Wati RT 1 RW 3 sebagai penyedia lahan, tenaga kerja dan pupuk.</p>

Gambar 5. Bapak Sutiksan, ketua kelompok tani desa Ngadisari dan pelaksana kemitraan sistem kerjasama bagi hasil “Maro”

Sumber: Dokumen Pribadi, 2015

Pelaksanaan kerjasama “Maro” ini umumnya banyak ditemukan di desa Ngadas dan Wonokitri, karena kegiatan bertani masih menjadi sektor utama sebagai penghasilan utama warga sedangkan dibidang lain seperti ternak dan pariwisata sebagai sampingan yang belum menjadi profesi utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan kondisi pertanian di desa Ngadisari, yang umumnya petani desa Ngadisari melaksanakan kegiatan usahatani mandiri, sebagian besar warga sudah mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyedia jasa sewa *home stay*, *jeep*, dan *kuda* untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan modal usahatani warga desa Ngadisari.

Selama proses penelitian, tidak banyak ditemukan petani yang masih melaksanakan kerjasama “Maro” di desa Ngadisari, sehingga mayoritas responden sebatas pernah melaksanakan kerjasama “Maro” pada periode sebelumnya. Sedangkan di desa Ngadas dan Wonokitri pola kerjasama “Maro” masih banyak ditemukan, petani pelaksana kerjasama ini banyak ditemukan masih berjalan sampai sekarang, umumnya pelaksanaan kerjasama maro terjadi pada musim hujan, hal ini dipengaruhi oleh biaya usahatani selama musim hujan cenderung tinggi akibat serangan hama dan biaya pemupukan bertambah.

Batas waktu Pola kerjasama kemitraan “Maro” dibidang pertanian di desa kawasan dataran tinggi Bromo selama ini belum ada patokan yang baku. Lama perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan. Umumnya lama pelaksanaan kerjasama sesuai patokan usia tanam sampai waktu panen masing- masing komoditas, selanjutnya bergantung pada kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama atau berhenti. Pelaku pelaksana kerjasama maro ini sering terjalin antar petani dalam kurun waktu dua sampai tiga kali masa panen, tujuannya untuk memperoleh cukup modal sebelum mengusahakan mandiri lahannya.

b. Mertelu / Sepertiga (*Pertelon*)

Pola kerjasama “Mertelu” / Sepertiga (*Mertelon*) di desa kawasan dataran tinggi Bromo merupakan kerjasama antara petani pemilik modal dengan petani pemilik lahan yang tidak memiliki biaya dalam usahatani. Pelaksanaan kerjasama “Mertelu” sering ditemukan pada penanaman komoditas kentang, tapi ada sebagian kecil petani yang melaksanakan kerjasama “Mertelu” dengan komoditas

kubis dan bawang prei. Kerjasama ini terdiri dari pihak pertama sebagai penyedia bibit, biaya pupuk dan obat-obatan selama satu kali masa panen komoditas kentang, kubis atau bawang prei. Selanjutnya pihak kedua sebagai penyedia tenaga kerja.

Pengadaan lahan sebagai tempat pelaksanaan usahatani tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pola kerjasama ini. Lahan dapat disediakan oleh pihak pertama atau pihak kedua. Umumnya pihak kedua sebagai pemilik lahan yang mencari *partner* untuk menanamkan modalnya dalam pelaksanaan usahatani. Beberapa kasus ditemukan petani pemilik modal biaya sekaligus sebagai penyedia lahan, hal ini disebabkan keterbatasan tenaga yang dimiliki pemilik lahan, sehingga lebih memilih diusahakan dengan pola kerjasama ini, untuk menghindari pem-bero-an atau kekosongan pengelolaan lahan.

Petani sebagai penyedia tenaga kerja berkewajiban mengelola usahatani selama keberlangsungan kerjasama baik dikerjakan sendiri atau menambah pekerja dari buruh tani dengan biaya dari pihak kedua. Pengelolaan usahatani yang menjadi tanggung jawab pihak kedua meliputi proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pemupukan, pengobatan sampai dengan proses pemanenan komoditas yang ditanam. Umumnya petani pemilik modal biaya sering ikut serta membantu tenaga dalam pengelolaan usahatani.

Pelaksana kerjasama “Mertelu”	Profil
	<p>Nama : Sri Wahyuni            Usia : 31 th            Pendidikan terakhir : SMP            Petani Penerima Modal/ Penyedia Tenaga Kerja dan Lahan            Kerjasama dengan Ibu Umi Lastini sebagai penyedia Modal Bibit, obat-obatan dan pupuk.</p>

Gambar 6. Petani pelaksana kerjasama bagi hasil “Mertelu” Desa Ngadas

Sumber: Dokumen Pribadi, 2015

Pembagian hasil panen pada pola kerjasama “Mertelu” umumnya dalam bentuk uang hasil penjualan atau hasil panen sesuai kesepakatan yang disetujui



oleh kedua petani sebagai pelaksana pola kerjasama ini. Penjualan hasil panen akan dibagi dengan perbandingan 1 : 2, maka pihak pertama sebagai penyedia bibit dan biaya pupuk dan obat-obatan akan menerima 2/3 bagian dari keseluruhan penjualan hasil panen. Sisanya sebesar 1/3 bagian hasil penjualan panen menjadi hak pihak kedua sebagai penyedia tenaga kerja selama satu musim tanam sampai panen komoditas tersebut. Kepemilikan lahan tidak menjadi pertimbangan dalam pembagian hasil keuntungan yang diperoleh dari kerjasama usahatani. Hal ini karena pengadaan lahan tidak termasuk dalam kesepakatan pelaksanaan kerjasama bagi hasil “Mertelu”.

Lama berlangsungnya pola kerjasama bagi hasil “Mertelu” umumnya berlangsung dua sampai tiga kali musim tanam. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan petani pemilik lahan untuk mencapai perolehan modal sebagai biaya pelaksanaan usahatani mandiri. Pola kerjasama “Mertelu” ini dapat terjadi lagi untuk petani yang sudah mandiri apabila usahatannya mengalami gagal panen sehingga tidak dapat menutupi biaya tanam komoditas yang diusahakan, untuk memenuhi kebutuhan modal petani kembali melaksanakan kerjasama “Mertelu” atau “Maro”.

### **5.3.2 Kemitraan dibidang Peternakan**

Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan dataran tinggi Bromo, disamping kegiatan usahatani sebagai sumber pendapatan utama. Terdapat 3 pola kerjasama yang terjalin antar petani dalam pelaksanaan usaha dibidang peternakan ini. Bentuk kerjasama dibidang peternakan berdasarkan hasil penelitian dikawasan dataran tinggi Bromo terdapat pola kerjasama “Maro” untuk ternak hewan sapi, pola kerjasama “Potong Bunci” untuk ternak babi dan pola kerjasama “Rawat ternak Kuda” merupakan pola kerjasama yang dilaksanakan oleh petani dikawasan dataran tinggi Bromo. Pelaksanaan kerjasama masing-masing komoditas dibidang peternakan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga hak dan kewajiban yang terjalin dalam masing-masing pola berbeda pula. Hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama dibidang peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Hak dan kewajiban kerjasama bagi hasil ternak

Jenis Ternak	Jenis Kemitraan	Hak dan Kewajiban			
		Pihak 1 (Pemilik Modal Ternak)		Pihak 2 (Perawat Ternak)	
		Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Sapi	Maro	Menentukan orang yang diajak bermitra	Menyediakan ternak sapi untuk pihak ke 2	Menerima ternak dari pihak 1	Menyediakan kandang atau sesuai kesepakatan
		Mengontrol ternak selama dirawat pihak 2		Menerima setengah bagian dari hasil penjualan sapi setelah dipotong modal biaya pembelian sapi	Menyediakan pakan dan obat-obatan untuk perawatannya
		Menerima pengembalian modal awal dari pihak 2 pada saat ternak dijual		Mengembalikan modal awal sesuai harga beli ternak pada awalnya pada saat ternak dijual	
		Menerima sebagian keuntungan dari hasil penjualan sapi		Memberikan bagian pemilik modal 50% dari hasil penjualan sapi setelah dipotong modal pembelian sapi	
Babi	Potong Bunci	Menentukan orang yang diajak bermitra	Menyediakan modal pengadaan ternak babi	Menerima ternak dari pihak 1	Menyediakan biaya pembuatan kandang atau sesuai kesepakatan
		Mengontrol ternak selama dirawat pihak 2	Menerima kembali modal pengadaan babi	Menerima 50% keuntungan dari hasil perbanyak perawatan babi setelah dipotong modal pengadaan babi	Menyediakan biaya pakan dan obat-obatan selama kerjasama perawatan atau sesuai kesepakatan
		Menerima 50% keuntungan dari hasil perbanyak babi setelah dipotong modal pembelian babi.	Memberikan 50% keuntungan dari hasil perbanyak perawatan babi setelah dipotong modal pengadaan babi		

Tabel 15. (Lanjutan)

Jenis Ternak	Jenis Kemitraan	Hak dan Kewajiban			
		Pihak 1 (Pemilik Modal Ternak)		Pihak 2 (Perawat Ternak)	
		Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Babi	Potong Bunci				mengembalikan induk babi kepada pemilik modal setelah perjanjian selesai
Kuda	Maro/ Rawat	Menentukan orang yang diajak bermitra	Menyediakan ternak kuda untuk pihak ke 2	Menerima ternak dari pihak 1	Menyediakan biaya pembuatan kandang atau sesuai kesepakatan
		Mengontrol ternak selama dirawat pihak 2	Menerima kembali kuda setelah masa perjanjian selesai sesuai kesepakatan	Menerima 50% keuntungan dari hasil pendapatan sewa kuda setelah dipotong biaya pakan dan obat- obatan atau sesuai kesepakatan dengan pemilik kuda	Menyediakan biaya pakan dan obat- obatan selama kerjasama perawatan
		Menerima 50% keuntungan dari hasil pendapatan sewa kuda setelah dipotong biaya pakan dan obat- obatan atau sesuai kesepakatan dari perawat kuda			Memberikan 50% keuntungan dari hasil pendapatan sewa kuda setelah dipotong biaya pakan dan obat- obatan atau sesuai kesepakatan dengan pemilik kuda
					Mengembalikan kuda kepada pemilik modal setelah perjanjian selesai

a. “Maro” atau “Potong Bunci”

Disamping istilah “Maro” atau *Marokne* untuk pertanian, istilah “Maro” juga berlaku pada kerjasama kemitraan dibidang peternakan. Pola kerjasama ini umumnya pada jenis ternak sapi dan babi. Pelaksanaan pola kerjasama ini, sebagai pihak pertama Pemaro (*Marokne*) menyediakan hewan ternak berupa sapi atau babi, untuk selanjutnya selama proses perawatan dan pemberian makan menjadi tanggung jawab pihak kedua sebagai “Maro”. Sebagai pihak kedua bertanggung jawab merawat hewan ternak sampai batas waktu sesuai kesepakatan.

Perawatan hewan ternak sapi dan babi meliputi pemberian makan dan obat-obatan yang diperlukan selama perjanjian kerjasama berlangsung. Batas waktu perjanjian rawat ternak belum ada ketentuan pasti, rata-rata sesuai kesanggupan pihak kedua sebagai perawat sapi dan babi. Perjanjian perawatan sapi umumnya selama dua sampai tiga tahun, sedangkan batas waktu hubungan kerjasama untuk perjanjian rawat babi umumnya menunggu sampai menghasilkan peranakan babi, induk babi dikembalikan kepada pemilik modal, hasil peranakan dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan.



Gambar 7. Pelaksanaan bagi hasil Maro atau Potong Bunci ternak Babi

Sumber: Dokumen Pribadi, 2015

Selanjutnya pada pembagian hasil rawat ternak sapi menggunakan perbandingan bagi hasil 1 : 1, dengan persyaratan hasil penjualan ternak sapi akan dipotong nilai modal yang dikeluarkan pihak pertama Pemaro (*Marokne*), sisanya dibagi dua sama rata untuk kedua belah pihak.

b. Kerjasama Rawat Ternak

Kerjasama rawat ternak dikawasan dataran tinggi Bromo umumnya dilaksanakan pada jenis hewan kuda, karena jenis ternak kuda digunakan sebagai salah satu sarana wisata, yaitu sewa kuda. Jenis tenak kuda hanya digunakan sebagai fasilitas wisatawan, tidak untuk dikonsumsi seperti ternak sapi dan babi. Pelaksanaan kerjasama rawat ternak kuda ini terdiri dari pemilik modal sebagai penyedia hewan ternak kuda, kemudian dirawat oleh pihak kedua sebagai perawat ternak. Pihak kedua bertanggung jawab dalam pemeliharaan kuda, meliputi biaya pemberian makan dan menjaga kesehatan kuda atau sesuai kesepakatan antara kedua pihak.

Pelaksana Kerjasama Rawat Kuda	Profil
	<p>Nama : Siswanto            Usia : 35 th            Pendidikan terakhir : SD            Investor/ Petani Pemilik Modal Ternak            Sebagai penyedia ternak dan pengadaan kandang ternak.            Kerjasama dengan Siswanto RT 2 RW 3            Sebagai penyedia tenaga rawat kuda dan menyewakan kuda.</p>

Gambar 8. Kemitraan sistem kerjasama rawat ternak kuda

Sumber: Dokumen Pribadi, 2015

Umumnya kerjasama ini terjalin antar saudara dan sebagian kecil dengan tetangga. Pembagian hasil dari kerjasama ini menyesuaikan kesepakatan antar kedua pihak, umumnya pembagian hasil dilakukan setiap seminggu sekali dengan perhitungan hasil pendapatan menyewakan kuda wisata dikurangi biaya pemberian makan dan rawat kuda, sisanya dibagi rata antara pemilik kuda dengan perawat kuda.

#### 5.4 Kelayakan Teknis Kemitraan

Proses pelaksanaan kerjasama yang terjalin antara petani dalam desa lokasi penelitian tergolong karakteristik kerjasama tradisional. Sepanjang peneliti

temui pola kerjasama yang ada dilaksanakan antar petani dengan petani dalam satu kawasan desa. Permasalahan permodalan dalam pengadaan sarana input usahatani dan keterbatasan jumlah tenaga kerja usahatani menciptakan pola kerjasama “Maro” dan “Mertelon”.

Sejarah kerjasama “Maro” sudah dikenal secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pola kerjasama mertelon sendiri mulai berkembang sejak tahun 2000-an, yang mana pola kerjasama ini akibat dari semakin berkurang dan terbatasnya tenaga kerja dibidang tani. Sementara itu rata-rata penduduk desa memiliki lahan pribadi di beberapa lokasi, sehingga setiap rumah tangga tani memilih untuk mengelola lahan milik sendiri. Sebagian kecil rumah tangga tani yang tidak memiliki biaya dan hanya memiliki lahan memilih untuk kerjasama “Mertelon” dengan kerabat atau tetangga mereka untuk mengelola lahannya.

Berdasarkan penilaian indikator kelayakan teknis menurut persepsi petani responden, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian lahan

Kesesuaian lahan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan usahatani, karena masing-masing komoditi memiliki karakteristik dalam memenuhi syarat tumbuhnya. Kesesuaian lahan dalam perjanjian kemitraan sistem kerjasama bagi hasil di daerah penelitian dalam persepsi petani responden dianggap *Kurang Penting*, sebagai pertimbangan dalam proses pelaksanaan kerjasama antar petani dikawasan dataran tinggi Bromo. Hal ini dipengaruhi oleh jenis tanah dan penggunaan lahan pada daerah penelitian cenderung sama, sehingga penilaian terhadap kesesuaian lahan tidak menjadi pertimbangan petani responden dalam menentukan pelaksanaan perjanjian kemitraan sistem kerjasama bagi hasil.

Tabel 16. Kesesuaian Lahan Sebagai Indikator Kelayakan Teknis Kemitraan

No.	Kesesuaian lahan sebagai indikator kelayakan teknis	Jumlah petani	(%)
1.	a. petani responden memperhitungkan klasifikasi lahan (S1, S2, S3, dan N), kualitas dan karakteristik lahan (topografi, jenis tanah, drainase, bahaya erosi, suhu dan curah hujan)	7	15,56
	b. Petani responden hanya memperhitungkan kualitas lahan saja atau kualitas dan karakteristik lahan saja	11	24,44
	c. Petani responden tidak memperhitungkan klasifikasi, kualitas dan karakteristik lahan	27	60
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data dari Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa indikator kesesuaian lahan *Kurang Peting* dalam hal menjadi pertimbangan proses perjanjian kemitraan sistem kerjasama bagi hasil dengan nilai 60% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Secara teknis petani responden dalam pelaksanaan kemitraan budidaya kentang tidak melakukan perhitungan terhadap klasifikasi, kualitas dan karakteristik lahan, hal ini dianggap sebagai proses yang membingungkan bagi petani. Petani responden kurang mempertimbangkan kesesuaian lahan, karena umumnya petani beranggapan bahwa dalam usaha meningkatkan hasil usahataniya dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan perawatan tanah dengan memberikan pupuk kandang sebelum musim tanam. Pengolahan lahan menggunakan pupuk kandang ini termasuk dalam perjanjian bagi hasil yang telah disepakati.

## 2. Kepemilikan luas lahan

Luas lahan merupakan salah satu faktor yang menunjang peningkatan hasil usahatani, semakin besar luas lahan yang dimiliki dengan manajemen usahatani yang baik dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Luas lahan bagi petani responden *Kurang Pening* menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kemitraan budidaya Kentang. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil adalah mengelola lahan yang kosong atau lahan milik petani yang kekurangan modal.

Tabel 17. Kepemilikan Luas Lahan Sebagai Indikator Kelayakan Teknis

No.	Kepemilikan Luas Lahan Sebagai Indikator Kelayakan Teknis	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani responden memilih mengerjakan luas lahan > 1 ha, dengan mengusahakan keperluan modal semaksimal mungkin (pinjam Bank/ pihak lain).	5	11,11
	b. Petani responden memilih mengerjakan luas lahan 0,5 – 1 ha, sesuai modal yang ada	12	26,67
	c. Petani responden memilih mengerjakan luas lahan < 0,5 ha atau semampunya	28	62,22
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 17 menunjukkan bahwa indikator kepemilik luas lahan dianggap *Kurang Penting* dalam penentuan pelaksanaan kemitraan budidaya kentang dan kerjasama secara umum di lokasi penelitian, dengan nilai 62,22% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Secara teknis pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil bertujuan memanfaatkan lahan yang tidak dikelola oleh pemiliknya, karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemilik tanah atau lahan kosong yang tidak dikelola oleh petani pemilik tanah sekaligus pemilik modal yang memiliki keterbatasan tenaga kerja untuk mengelola lahannya. Petani pemilik modal menganggap luas lahan *Kurang Penting* dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui atau tidaknya kerjasama tersebut berlangsung, responden petani pemilik modal cenderung melaksanakan kerjasama berdasarkan melihat ketersediaan bibit yang dimiliki setelah dikurangi penanaman lahannya sendiri. Selama petani pemilik modal masih memiliki persediaan bibit dan modal biaya pengadaan pupuk dan obat-obatan, maka petani menyanggupi pelaksanaan kemitraan.

### 3. Aset Sarana Pertanian Sederhana

Aset sarana pertanian sederhana merupakan penunjang utama pengelolaan usahatani. Aset sarana pertanian yang tergolong sederhana dilokasi penelitian berupa cangkul, sabit, dan tangki penyemprotan obat. Sarana ini merupakan peralatan tani yang umum dimiliki oleh petani di kawasan dataran tinggi Bromo. Kepemilikan aset sarana pertanian sederhana menurut pendapat petani responden dinilai *Kurang Penting* sebagai pertimbangan menentukan untuk melaksanakan perjanjian kemitraan sistem kerjasama bagi hasil. Dominasi penduduk kawasan dataran tinggi Bromo merupakan petani sayuran, sehingga mayoritas rumah



tangga tani memiliki peralatan usahatani sederhana berupa cangkul, sabit, dan alat semprot.

Tabel 18. Aset Sarana Pertanian Sederhana Sebagai Indikator Kelayakan Teknis

No.	Aset Sarana Pertanian Sederhana Sebagai Indikator Kelayakan Teknis	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Aset sarana pertanian sederhana harus dimiliki calon mitra yang akan berkerjasama	11	24,44
	b. Aset sarana pertanian sederhana menggunakan kepemilikan pihak mana saja yang memiliki	16	35,56
	c. Aset sarana pertanian sederhana bisa disediakan pihak yang bersedia	18	40
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa indikator kepemilikan sarana usahatani sederhana dilokasi penelitian merupakan indikator teknis yang *Kurang Penting* dalam hal menjadi penentu kelayakan teknis dalam perjanjian pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil dengan nilai 40% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Pengadaan aset sarana usahatani sederhana menjadi tanggung jawab pihak penyedia tenaga kerja. Umumnya aset sarana sederhana merupakan kebutuhan pokok yang sudah dimiliki oleh seluruh rumah tangga petani di kawasan dataran tinggi Bromo.

#### 4. Aset Sarana Pertanian Modern

Aset sarana pertanian modern merupakan bentuk inovasi teknologi pertanian yang berkembang dalam masyarakat pertanian. Aset sarana pertanian modern di lokasi penelitian meliputi penggunaan alat pertanian berupa mesin diesel yang digunakan untuk memompa air dalam proses irigasi bagi komoditas usahatani kentang dikawasan dataran tinggi Bromo. Kepemilikan aset sarana pertanian modern menurut pendapat petani responden dinilai *Kurang Penting* sebagai pertimbangan menentukan untuk melaksanakan perjanjian kemitraan sistem kerjasama bagi hasil. Dominasi penduduk kawasan dataran tinggi Bromo merupakan petani sayuran secara turun-temurun, sehingga mayoritas rumah tangga tani memiliki peralatan usahatani modern berupa mesin diesel.

Tabel 19. Aset Sarana Pertanian Modern

No.	Aset Sarana Pertanian Modern Sebagai Indikator	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Aset sarana pertanian modern harus dimiliki calon mitra yang akan berkerjasama	5	11,11
	b. Aset sarana pertanian modern menggunakan kepemilikan pihak mana saja yang punya	23	51,11
	c. Aset sarana pertanian modern bisa disediakan/sewa dengan biaya ditanggung bersama	17	37,78
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa indikator kepemilikan sarana usahatani modern dilokasi penelitian merupakan indikator teknik yang *Cukup Penting* dalam hal menjadi penentu kelayakan teknis dalam perjanjian pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil dengan nilai 51,11% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Pengadaan aset sarana usahatani modern berupa mesin diesel menjadi tanggung jawab pihak penyedia tenaga kerja atau penerima modal. Apabila pihak penerima modal tidak memiliki mesin diesel, kebutuhan mesin diesel sebagai sarana irigasi usahatani kentang dapat dipenuhi oleh petani pemilik modal atau dengan sistem sewa mesin kepada tetangga yang memiliki mesin diesel dengan mengganti biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar untuk penggunaan mesin diesel menjadi tanggung jawab penerima modal sebagai pengelola lahan, atau sesuai kesepakatan.

##### 5. Pengalaman Mengikuti Kerjasama Mitra Bagi Hasil Petani Calon Mitra

Pengalaman mengikuti kerjasama mitra bagi hasil menunjukkan tingkat pengetahuan dan manajemen mengelola usahatani dengan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil. Lama pengalaman melaksanakan kerjasama bagi hasil sebagai salah satu faktor yang digunakan untuk mengetahui kemampuan petani dalam menghadapi kendala selama kerjasama berlangsung. Pengalaman mengikuti kemitraan bagi petani responden merupakan indikator yang dianggap *Kurang Penting* dalam hal sebagai pertimbangan menentukan perjanjian kerjasama. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan rata-rata petani di kawasan dataran tinggi Bromo dianggap pernah memiliki pengalaman kemitraan kerjasama bagi

hasil “Maro” atau “Mertelon”, sehingga lama pengalaman mengikuti kemitraan kurang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Tabel 20. Pengalaman Mengikuti Kerjasama Sebagai Indikator Kelayakan Teknis

No.	Pengalaman Mengikuti Kelayakan Teknis	Kerjasama Sebagai Indikator	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani calon mitra melaksanakan kerjasama mitra bagi hasil selama > 5 tahun	memiliki pengalaman	8	17,78
	b. Petani calon mitra memiliki pengalaman 1 – 5 tahun	memiliki pengalaman	12	26,67
	c. Petani calon mitra tidak memiliki pengalaman kerjasama kemitraan bagi hasil	tidak harus memiliki	25	55,56
Jumlah			45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 20 menunjukkan bahwa indikator lama pengalaman mengikuti kemitraan sistem kerjasama bagi hasil, *Kurang Penting* dalam hal menjadi faktor penentu pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan nilai 55,56 % dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan pelaksanaan kemitraan dengan sistem kerjasama bagi hasil untuk membantu petani kekurangan modal dengan memanfaatkan kepemilikan benih yang masih dimiliki petani modal setelah menyelesaikan penanaman dilahannya sendiri.

#### 6. Keahlian (*Skill*) Usahatani Petani Calon Mitra

Keahlian (*Skill*) merupakan modal utama yang harus dimiliki dalam melaksanakan usahatani, diperlukan ketekunan untuk mendapatkan keahlian dalam mengelola usahatani. Keahlian (*Skill*) dalam diri petani calon mitra usahatani merupakan indikator yang rata-rata dianggap Kurang penting dalam hal menentukan perjanjian kemitraan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat kawasan dataran tinggi Bromo merupakan petani secara turun-temurun, sehingga keahlian bertani dianggap sama rata, karena bertani merupakan warisan budaya yang akan terus dijaga oleh warga keturunan suku Tengger.

Tabel 21. Keahlian (*Skill*) Usahatani Sebagai Indikator Kelayakan Teknis

No.	Keahlian ( <i>Skill</i> ) Usahatani Sebagai Indikator Teknis	Kelayakan	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani calon mitra memiliki usahatani >15 tahun	pengalaman	12	26,67
	b. Petani calon mitra memiliki usahatani 5 – 15 tahun	pengalaman	17	37,78
	a. Aset sarana pertanian modern disediakan/sewa dengan biaya ditanggung bersama	bisa	16	35,56
Jumlah			45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 21 menunjukkan bahwa indikator keahlian (*Skill*) bagi petani responden dianggap sebagai indikator *Cukup Penting* dalam hal penentuan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan nilai 37,78% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh keahlian bertani dianggap cenderung sama karena kegiatan bertani merupakan pekerjaan utama bagi seluruh warga kawasan dataran tinggi Bromo.

#### 7. Jumlah Angkatan Kerja Dalam Keluarga Petani Calon Mitra

Jumlah angkatan kerja dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang menunjang kesuksesan usahatani, hal ini mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dalam pelaksanaan usahatani yang dapat dialokasikan dalam berbagai kondisi. Secara umum biaya tenaga kerja dapat ditekan dengan cara memaksimalkan penggunaan tenaga kerja yang dimiliki dalam keluarga. Jumlah angkatan kerja dalam keluarga pada pelaksanaan kemitraan sistem bagi hasil di lokasi penelitian rata-rata dianggap sebagai faktor yang tergolong *Cukup Penting* dalam hal menentukan kerjasama kemitraan. Hal ini dipengaruhi anggapan petani responden bahwa kegiatan usahatani memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga dengan adanya jumlah anggota keluarga yang mampu bekerja, dapat mengoptimalkan kegiatan usahatani.

Tabel 22. Jumlah Angkatan Kerja Dalam Keluarga Sebagai Indikator Kelayakan Teknis

No.	Jumlah Angkatan Kerja Dalam Keluarga Sebagai Indikator Kelayakan Teknis	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani calon mitra memiliki > 4 anggota keluarga angkatan kerja	13	28,89
	b. Petani calon mitra memiliki 3 - 4 anggota keluarga angkatan kerja	19	42,22
	c. Petani calon mitra memiliki $\leq$ 2 anggota keluarga angkatan kerja	13	28,89
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Data pada Tabel 22 menunjukkan bahwa indikator jumlah anggota kerja dalam keluarga merupakan indikator teknis *Cukup Penting* dalam menentukan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan nilai 42,22% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini disebabkan oleh persepsi petani responden yang beranggapan bahwa permasalahan pertanian di kawasan dataran tinggi Bromo utamanya adalah keberadaan jumlah tenaga kerja yang semakin terbatas. Keterbatasan jumlah tenaga kerja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah tenaga kerja usia produktif beralih ke bidang wisata, berkerja di bidang wisata dianggap lebih ringan pekerjaannya, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.



Tabel 23. Persepsi petani terhadap indikator kelayakan teknis calon mitra usahatani

No.	Indikator	Skor Rata-Rata	Skor Maks	(%)	Kategori
1	Kesesuaian lahan	1,47	3	48,89	Kurang penting
2	Kepemilikan luas lahan	1,40	3	46,67	Kurang penting
3	Aset sarana pertanian sederhana	1,67	3	55,56	Kurang penting
4	Aset sarana pertanian modern	1,64	3	54,81	Kurang penting
5	Pengalaman mengikuti kerjasama mitra bagi hasil petani calon mitra	1,40	3	46,67	Kurang penting
6	Keahlian ( <i>Skill</i> ) usahatani petani calon mitra	1,58	3	52,59	Kurang penting
7	Jumlah angkatan kerja dalam keluarga petani calon mitra	1,69	3	56,30	Cukup penting
	Jumlah	10,84		51,64	Kurang penting

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan hasil data indikator kelayakan teknis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa indikator teknis yang tergolong dalam kategori *Cukup Penting* sebagai pertimbangan pelaksanaan kemitraan adalah indikator jumlah angkatan kerja dalam keluarga dengan nilai 56,30% atau nilai skor 1,69 selengkapnya pada lampiran 4. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan utama yang dihadapi petani pada masa sekarang, yaitu semakin terbatasnya petani produktif diusia muda. Hal ini disebabkan oleh pilihan dapat berkerja disektor lain, seperti sektor pariwisata dan perdagangan. Pekerja dibidang usahatani didominasi oleh tenaga kerja usia tua, pada tingkat usia tua petani cenderung mengerjakan lahannya sendiri atau sebatas kemampuannya dalam mengelola lahan milik orang lain. Sehingga jumlah angkatan kerja dalam keluarga dalam pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil *Cukup Penting* sebagai jaminan ketersediaan tenaga pengelolaan usahatani.

Secara keseluruhan skor rata-rata menunjukkan pendapat petani responden tentang kelayakan teknis pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi

hasil dalam kategori *Kurang Penting* dengan nilai 51,64 % atau nilai skor rata-rata 10,84. Nilai persentase dan skor tersebut menyatakan bahwa petani responden memberikan persepsi *Kurang Penting* terhadap indikator kelayakan teknis yang peneliti ajukan. Persepsi *Kurang Penting* pada indikator yang penulis ajukan tersebut karena petani memiliki tujuan dalam kemitraan sistem kerjasama bagi hasil ini untuk membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan modal usahatani. Selain itu sistem kerjasama ini bertujuan untuk menghindari penguasaan lahan desa oleh warga diluar kawasan desa tersebut. Pelaksanaan pola kemitraan sistem kerjasama bagi hasil ini mengutamakan hubungan kekeluargaan dan sesama warga desa untuk mensejahterakan warga dalam satu desa keturunan suku Tengger.

### 5.5 Kelayakan Moral Kemitraan

Moral merupakan penilaian terhadap sifat-sifat yang mendominasi dalam pribadi seseorang, dalam pelaksanaan kerjasama di bidang usahatani kelayakan moral menjadi faktor utama bagi petani untuk mempertimbangkan keputusan memilih usaha mandiri atau berkerjasama. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan kemitraan dengan sistem kerjasama bagi hasil, maka berikut merupakan uraian indikator kelayakan moral yang utama di daerah penelitian kawasan dataran tinggi Bromo:

#### 1. Jujur

Jujur merupakan suatu modal utama dalam semua jenis pekerjaan. Indikator jujur menjadi faktor utama yang menjadi penilaian petani pemilik modal dalam menentukan rekan kerjasamanya. Pemilik modal sebagai penentu terjalannya kerjasama mitra usahatani, setelah mengenal calon rekan kerjasamanya, pemilik modal akan mencari tahu informasi terkait pengalaman yang dimiliki calon rekan kerjasamanya secara mendalam sebelum memutuskan melaksanakan dan atau melanjutkan kerjasama usahatannya.

Tabel 24. Jujur Sebagai Indikator Kelayakan Moral

No.	Jujur Sebagai Indikator Kelayakan Moral	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani calon mitra mampu menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, alokasi jumlah bibit, pupuk, obat- obatan sesuai prosedur tanpa perlu pengawasan pemilik modal.	42	93,33
	b. Petani calon mitra menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, alokasi jumlah bibit, pupuk, obat- obatan sesuai prosedur dengan jadwal pengawasan jarang	3	6,67
	c. Petani calon mitra menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, alokasi jumlah bibit, pupuk, obat- obatan sesuai prosedur, tetapi harus dengan pengawasan ketat	0	0
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data Tabel 24 menyatakan bahwa indikator moral jujur dalam pelaksanaan kerjasama mitra merupakan faktor yang masuk dalam kategori *Sangat Penting* dengan nilai 93,33% dari total responden berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi petani kawasan dataran tinggi Bromo bahwa kejujuran modal utama dalam pelaksanaan kerjasama, pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama yang terjalin antar petani berdasarkan rasa saling percaya, sehingga nilai kejujuran sangat dijunjung tinggi oleh warga kawasan dataran tinggi Bromo.

## 2. Tanggung jawab

Rasa tanggung jawab merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam berusahatani. Tanggung jawab dalam kemitraan sistem kerjasama bagi hasil pada lokasi penelitian dinilai dari pelaksanaan kewajiban yang telah disanggupi, sebagai penyedia tenaga kerja, rekan kerjasama kemitraan usahatani berkewajiban menyediakan tenaga dalam mengelola budidaya komoditas yang telah disepakati, kesesuaian waktu dan teknik perawatan tanaman menjadi ukuran tanggung jawab dalam kerjasama ini.



Tabel 25. Tanggung Jawab Sebagai Indikator Kelayakan Moral

No.	Tanggung Jawab Sebagai Indikator Kelayakan Moral	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Pelaksanaan kerjasama, masing- masing pihak melaksanakan kewajiban penuh sesuai kesepakatan pembagian pekerjaan, sebagai pemilik modal bertanggung jawab menyediakan kebutuhan modal, sebagai penyedia tenaga kerja bertanggung jawab mengelola lahan yang menjadi kesepakatan kerjasama dan resiko gagal panen menjadi tanggungan sesuai kesepakatan	37	82,22
	b. Pelaksanaan kerjasama, pembagian tugas pengadaan modal dan tenaga kerja mengalami perubahan, kurang sesuai kesepakatan.	7	15,56
	c. Pelaksanaan kerjasama menyesuaikan kebutuhan, tidak sesuai kesepakatan awal	1	2,22
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data Tabel 25 menyatakan bahwa indikator moral bertanggung jawab dengan nilai 82,22% dari total responden. Moral tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama mitra merupakan faktor yang masuk dalam kategori *Sangat Penting* berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi petani kawasan datarang tinggi Bromo bahwa moral bertanggung jawab merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi masing- masing pihak dalam pelaksanaan kerjasama, untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

### 3. Rajin

Rajin merupakan kesadaran diri setiap manusia dalam mencapai keinginan yang akan dituju. Penilaian rajin dalam kerjasama mitra usahatani ini adalah melaksanakan tanggung jawab yang diberikan tanpa melakukan kesalahan.

Tabel 26. Rajin Sebagai Indikator Kelayakan Moral

No.	Rajin Sebagai Indikator Kelayakan Moral	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Petani calon mitra melaksanakan bagian kerjanya diselesaikan sesuai tanggung jawab, petani sebagai penyedia tenaga kerja mampu menyelesaikan tugasnya tanpa melakukan kesalahan.	30	66,67
	b. Petani calon mitra melaksanakan bagian kerjanya diselesaikan sesuai tanggung jawab, petani sebagai penyedia tenaga kerja mampu menyelesaikan tugasnya dengan toleransi sedikit kesalahan	8	17,78
	c. Petani calon mitra melaksanakan bagian kerjanya diselesaikan sesuai tanggung jawab, petani sebagai penyedia tenaga kerja mampu menyelesaikan tugasnya dengan toleransi tidak terbatas	7	15,56
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data Tabel 26 menyatakan bahwa indikator moral rajin dengan nilai 66,67% dari total responden, dalam pelaksanaan kerjasama mitra merupakan faktor yang masuk dalam kategori *Sangat Penting* berdasarkan nilai persepsi responden. hal ini dipengaruhi oleh persepsi petani kawasan datarang tinggi Bromo bahwa keberhasilan usahatani didapatkan dengan kerja keras, kerja keras pada petani dapat dinilai dari moral rajin dalam menekuni usahatani yang dikerjakan.

#### 4. Tekun

Tekun merupakan indikator moral yang ditunjukkan petani dalam melaksanakan pekerjaan dengan senang hati tanpa menganggapnya sebagai beban, penilaian dalam kerjasama usahatani adalah ketepatan perawatan tanam dengan inisiatif pribadi.

Tabel 27. Tekun Sebagai Indikator Kelayakan Moral

No.	Tekun Sebagai Indikator Kelayakan Moral	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Kinerja pengelolaan usahatani lebih dari rata-rata ukuran jam kerja selama 10 jam dalam satu hari	29	64,44
	b. Kinerja pengelolaan usahatani sama dengan rata-rata ukuran jam kerja selama 10 jam dalam satu hari	8	17,78
	c. Kinerja pengelolaan usahatani kurang dari rata-rata ukuran jam kerja selama 10 jam dalam satu hari	8	17,78
Jumlah		45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data Tabel 27 menyatakan bahwa indikator moral tekun dengan nilai 64,44% dari total responden, dalam pelaksanaan kerjasama mitra merupakan faktor yang masuk dalam kategori *Sangat Penting* berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi petani kawasan datarang tinggi Bromo bahwa diperlukan ketekunan dalam mengelola usahatani, perolehan hasil panen sangat ditentukan oleh proses perawatan selama masa tanam, meliputi ketepatan pemupukan, pengaturan irigasi dan tindakan menanggulangi serangan hama penyakit. Sehingga diperlukan karakter moral tekun dalam proses perawatan usahatannya.

#### 5. Disiplin

Sifat disiplin yang dimiliki calon rekan kerjasama usahatani ini adalah kemampuan tugas secara sistematis dan taat kepada waktu. Penilaian petani pada indikator ini adalah kemampuan mengelola lahan usahatannya ketika menghadapi bencana longsor, hujan, dan serangan hama.

Tabel 28. Disiplin Sebagai Indikator Kelayakan Moral

No.	Disiplin Sebagai Indikator Kelayakan Moral	Jumlah Petani	(%)
1.	a. Ketepatan waktu kinerja pengelolaan usahatani lebih dari rata-rata ukuran kerja 6 hari kerja dalam satu minggu	24	53,33
	b. Ketepatan waktu kinerja pengelolaan usahatani sama dengan ukuran kerja 6 hari kerja dalam satu minggu	13	28,89
	c. Ketepatan waktu kinerja pengelolaan usahatani kurang dari rata-rata ukuran kerja 6 hari kerja dalam satu minggu	8	17,78
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dari data Tabel 28 menyatakan bahwa indikator moral disiplin dengan nilai 53,33% dari total responden, dalam pelaksanaan kerjasama mitra merupakan faktor yang masuk dalam kategori *Sangat penting* berdasarkan nilai persepsi responden. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi petani kawasan datarang tinggi Bromo bahwa keberhasilan usahatani ditentukan oleh pengelolaan ketepatan waktu dalam perawatan komoditas yang dikelola, pada kondisi alam di kawasan dataran tinggi Bromo tergolong rawan longsor akibat kemiringan dan keterbatasan jumlah pohon sebagai penyangga tanah, mengharuskan petani untuk segera menanggulangi dampak longsor tersebut. Sehingga petani penggarap harus

memiliki moral dominan disiplin untuk menjamin kesuksesan kemitraan yang akan dijalankan.

Tabel 29. Indikator Kelayakan Moral Calon Mitra

No.	Indikator	Skor Rata- Rata	Skor Maks	(%)	Kategori
1	Jujur	2,76	3	91,85	Sangat penting
2	Tanggung jawab	2,36	3	78,52	Sangat penting
3	Rajin	2,24	3	74,81	Cukup penting
4	Tekun	2,20	3	73,33	Cukup penting
5	Disiplin	2,27	3	75,56	Cukup penting
	Jumlah	11,82	3	78,81	Sangat penting

Sumber: Data primer diolah, 2015

Dengan demikian dapat diketahui persepsi petani responden tentang kelayakan moral pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil dalam kategori *Sangat Penting* dengan nilai 78,81 %, dengan skor rata- rata 11,82 selengkapnya pada lampiran 4. Nilai persentase dan skor tersebut menyatakan bahwa petani responden memberikan persepsi *Sangat Penting* terhadap indikator kelayakan moral yang peneliti ajukan. Persepsi *Sangat Penting* pada indikator yang penulis ajukan tersebut karena petani dalam pelaksanaan kemitraan sistem kerjasama bagi hasil ini untuk membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan modal usahatannya, sehingga petani responden menilai bahwa moral jujur, tanggung jawab, rajin, tekun dan disiplin sebagai landasan dasar dalam penentuan kesepakatan kemitraan.